

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
(Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik
Guna Mencapai Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Administrasi Publik



Oleh :
SYAIRAH MARSES
NIM. 201911063

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Identitas Penulis,

Nama : Syairah Marses
NIM : 201911063
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diperiksa dan disetujui
Pada tanggal :08 Agustus 2023

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si

NIDN: 1207086708

Girinius Wenda,S.Sos,M.Si

NIDN: 1412108801

Mengetahui :
Ketua Program Studi

Irmayani Misrah,S.Sos,M.A.P.

NIDN: 1409108402

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Telah Dipertahankan Skripsi Ini Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Hari Jumat Tanggal 08 September 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si

NIDN: 1207086708

Girinius Wenda, S.Sos.M.Si

NIDN: 1412108801

Anggota,

Anggota,

Nur Aini, S.Sos.,M.AP

NIDN.1422127401

Bambang Supeno Domi, S.Sos.,M.Si

NIDN. 1204076701

Mengetahui,

Dekan FISIP

Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si

NIDN: 1207086708

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahuwata'ala yang menjadi sumber dari segala kekuatan atas berkat rahmat yang senantiasa tercurahkan sehingga penulis dapat termotivasi dan terbimbing untuk merampungkan skripsi dengan baik dan lancar.

Didalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak **Dr. H. Rudihartono Ismail, M.Pd** selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, yang Telah mendorong dan memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan studi;
2. Ibu **Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu soial dan Ilmu Politik;
3. Ibu **Irmayani Misrah, S.Sos, M.A.P** selaku Ketua Program studi yang telah memberikan motivasi untuk cepat menyelesaikan studi akhir;
4. Ibu **Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si** selaku Pembimbing I yang telah bersedia membimbing penulis;
5. Bapak **Girinius Wenda, S.Sos., M.Si** selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing penulis;
6. Bapak **Soltan Takdir, S.T., M.Si** selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk cepat menyelesaikan studi akhir;
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Pegawai di Lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis selama menekuni studi.

8. Bapak Arklaus Windesi,S.Sos,M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya yang telah memfasilitasi peneliti selama proses penelitian;
9. Ibu Haspida Pawakkangi,S.H,M.Si selaku Sekertaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya yang telah memfasilitasi peneliti selama proses penelitian;
10. Seluruh responden penelitian, Pegawai-Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah bersedia mengisi kuesioner;
11. Orang tuaku tercinta Ayahanda(Alm) Marses dan Ibunda Masriani yang telah membesarkan penulis sertaka kakakku Nurika, Yuyun, Muhadir serta adikku Inriani yang telah memberikan doa dan restu sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu;
12. Seluruh rekan – rekan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena atas kebersamaannya selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, dimana masih jauh dari suatu karya ilmiah yang baik dan sempurna. Oleh karena itu atas segala kekurangannya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan ini.

Semoga semua amal bhakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan yang Maha Esa dan skripsi ini juga bermanfaat dihati pembaca.

Wamena, 08agustus 2023

Penulis,

SYAIRAH MARSES

NIM.201911063

ABSTRAKSI

SYAIRAH MARSES NIM. 201911063. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Jayawijaya (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika)”. Pembimbing : (Telly Nancy Silooy dan Girinius Wenda).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Jayawijayan dengan mengacu pada indikator pelaksanaan kebijakan oleh George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara Deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Jayawijaya dengan nilai skor sebesar 126,19 dikategorikan baik, indikator komunikasi menghasilkan perolehan nilai skor sebesar 128,75 dengan kategori baik, indikator kedua mengenai sumber daya dengan perolehan nilai skor sebesar 122 dengan kategori baik, indikator ketiga mengenai disposisi dengan perolehan nilai skor sebesar 124 dengan kategori baik, dan indikator keempat mengenai struktur birokrasi dengan perolehan nilai skor 130 kategori baik.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Komunikasi.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	6
1. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik....	6
2. Pengertian Keterbukaan.....	11
3. Pengertian informasi.....	12
4. Pengertian Informasi Publik.....	14
5. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik.....	17
6. Kebijakan keterbukaan Informasi.....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	23
C. Definisi Operasional.....	25
D. Kerangka Konseptual.....	27
BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
1. Lokasi Penelitian.....	28
2. Waktu Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Populasi dan Sampel.....	28

1.	Populasi.....	28
2.	Sampel.....	29
D.	Instrument Penelitian.....	29
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
F.	Teknik Analisa Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A	Hasil	
	Penelitian.....	32
1.	Keadaan Lokasi Penelitian.....	32
2.	Keadaan Responden.....	46
3.	Analisa Data.....	52
B	Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

KUISIONER

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Nilai Interpretasi Skor.....	31
Tabel 4.1 Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4.2 Keadaan Responden Menurut Agama.....	46
Tabel 4.3 Keadaan Responden Menurut Usia.....	47
Tabel 4.4 Keadaan Responden Menurut Jabatan.....	47
Tabel 4.5 Keadaan Responden Menurut Masa Kerja.....	50
Tabel 4.6 Keadaan Responden Menurut Pangkat.....	50
Tabel 4.7 Keadaan Responden Menurut Golongan.....	51
Tabel 4.8 Keadaan Responden Menurut Pendidikan Terakhir.....	51
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Terkait Tentang Penyampaian Informasi Publik Secara Cepat.....	52
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Sudah Disosialisasikan Kepada Masyarakat.....	53
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Terkait Pegawai Memahami Tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.....	53
Tabel 4.12 Tanggapan Responden Terkait Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Telah Melakukan Koordinasi Secara Rutin.....	54
Tabel 4.13 Tanggapan Responden Tentang Tersedia Sarana Dalam Mendukung Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.....	55
Tabel 4.14 Tanggapan Responden Tentang Tersedia Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.....	56
Tabel 4.15 Tanggapan Responden Tentang Pegawai Memiliki Keahlian Dalam Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.....	56

Tabel 4.16 Tanggapan Responden Tentang Tersedia Dana Dalam Menyampaikan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.....	57
Tabel 4.17 Tanggapan Responden Tentang Tersedia Sumber Informasi Dari Dinas-Dinas Terkait Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.....	58
Tabel 4.18 Tanggapan Responden Tentang Pegawai Bertanggung Jawab Dalam Mengerjakan Pekerjaannya.....	59
Tabel 4.19 Tanggapan Tentang Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Sangat Adil Dalam Memberikan Tugas Kepada Pegawainya.....	60
Tabel 4.20 Tanggapan Responden Tentang Pegawai Sangat Disiplin Dalam Waktu.....	60
Tabel 4.21 Tanggapan Responden Tentang Pegawai Konsisten Dalam Melaksanakan Tugas	61
Tabel 4.22 Tanggapan Responden Tentang Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Sangat Adil Dalam Memberikan Tugas Kepada Pegawainya.....	62
Tabel 4.23 Tanggapan Responden Terkait Dilaksanakan Kebijakan Keterbukaan Informasi Sesuai Dengan Standar Operasional	63
Tabel 4.24 Tanggapan Responden Terkait Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Sudah Menetapkan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik.....	64
Tabel 4.25 Tanggapan Responden Terkait Adanya Pembagian Tugas Yang Jelas Dalam Menyebarluaskan Pekerjaan.....	64
Tabel 4.26 Perolehan Skor untuk indikator komunikasi.....	66
Tabel 4.27 Perolehan Skor Untuk Indikator Sumber Daya.....	68
Tabel 4.28 Perolehan Skor Untuk Indikator Disposisi Atau Sikap.....	71

Tabel 4.29 Perolehan Skor Untuk Indikator Struktur Birokrasi
..... 73

Tabel 4.30 Rekapitulasi Perolehan Skor Rata-Rata Tentang Implementasi
Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten
Jayawijaya..... 74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 2.1 Kerangka Konseptual.....	27
Tabel 4.1 Struktur Organisasi.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1. Kuesioner
- 1.2. Identitas Responden
- 1.3. Data Hasil Kuesioner
- 1.4. Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten
Jayawijaya
- 1.5. Surat Pengantar Pelaksanaan Penelitian
- 1.6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- 1.7. Foto-Foto Bersama Responden

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memperkuat hak asasi manusia dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) Pasal 28F menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” maka dapat dijelaskan bahwa setiap warga Negara dapat memberikan pada orang lain informasi baik dalam memperoleh pengetahuan dan menyampaikan informasi baik secara komunikasi, tulisan maupun dengan menggunakan dunia maya atau sosial media selagi informasi itu memberikan pengembangan kepada orang lain.

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM) karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Selain itu dengan adanya keterbukaan informasi publik masyarakat juga dapat memantau lajunya kinerja pemerintahan. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan *good governance*.

Secara fundamental, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik bertujuan untuk: (a). menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (b). mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (c). meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (d). mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (e). mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (f). mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (g). meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik tidak akan terwujud kecuali pemerintah daerah menyadari bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warganya, dan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik, serta Peraturan Pemerintah daerah tentang publik. Keterbukaan informasi. Namun, diyakini masih banyak pemerintah daerah yang mendominasi pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelayanan publik, dan penatausahaan sumber daya dan aset daerah saat ini. Sementara itu, akses warga semakin terbatas, seiring dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus mengedepankan hubungan “patron-klien” antara elit birokrasi pemerintah dengan mereka yang ingin memanfaatkannya.

Badan publik yang memiliki tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dalam Undang-Undang, lingkup badan publik meliputi lembaga-lembaga serta penyelenggara lainnya yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) dan juga anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) www.jayawijaya.go.id. Dinas Komunikasi dan Informatika baik dalam tingkat nasional, Regional maupun daerah memiliki tugas pokok yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Adanya Undang-Undang yang mengatur keterbukaan informasi publik maka badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik agar tujuan dari undang-undang tersebut dapat tercapai.

Standar operasional prosedur (SOP) sudah berjalan dengan baik dengan memakai peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imanuel G. M. Sawaki, S.Kom yaitu dukungan lintas sektoral dalam mendukung program Keterbukaan Informasi Publik yang terjadi sekarang adalah dalam 40 organisasi perangkat daerah (OPD) ini komunikasi dan informasi kurang saling mendukung, kurang adanya informasi dari lintas sektoral, yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, melibatkan pejabat daerah untuk diliput dan dipublikasikan secara luas, jadi komunikasi dengan lintas sektoral selama ini kurang terjalin dengan baik, sehingga menyebabkan informasi yang keluar untuk menjadi konsumsi publik juga tidak selengkap yang seharusnya. Masyarakat sekarang dapat mengakses keterbukaan informasi publik melalui website Kabupaten yang

dikelolah oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya sedangkan sumber daya manusia dibidang teknologi dan informatika kurang mencukupi karena banyak pegawai yang keahlian atau gelarnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di Dinas Komunikasi dan Informasi, kalau honorer sudah mencukupi karena latar belakang gelarnya atau keahliannya berhubungan dengan komunikasi dan informasi dan pegawai staf hanya ada dua orang, honorer hanya ada dua orang diketerbukaan informasi, kepala seksi dan kepala bidang tidak ada karena sudah pensiun, kekurangan jurnalis untuk mencari suatu berita.

Dari sisi sarana dan prasarana masih kurang untuk menunjang penyebaran informasi dan ketika ada pejabat daerah yang kemana dan Dinas komunikasi dan informasi harus mengikuti untuk melakukan peliputan biasanya numpang karena secara teknis lapangan tidak mempunyai kendaraan dan peralatan seadanya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Jayawijaya”**.

B. Batasan Masalah

Masalah penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik studi kasus diDinas Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Jayawijaya dengan indikator yang diteliti adalah : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah: seberapa baik Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara utuh tentang kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Jayawijaya yang dilaksanakan oleh Dinas komunikasi dan informasi di Kabupaten Jayawijaya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya menciptakan Implementasi Kebijakan Informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan keterbukaan informasi publik

a. Pengertian Implementasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Sedangkan menurut Syaikhani dkk (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna mengerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana mengantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian

dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Sumaryadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu : (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan. Suatu kebijakan haruslah diimplementasikan dengan tepat karena apabila sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan gagal pun dapat terjadi apabila proses implementasi tidak tepat. Dalam implementasi kebijakan publik terdapat berbagai ragam tindakan seperti: mengumpulkan data, mendistribusikan informasi, menganalisis berbagai masalah, mengalokasikan dan merekrut personalia, merencanakan atas masa depan dan lain-lain Kapahang et al., (2020)

Menurut George Edward III dalam Kapahang et al., (2020) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu

faktor (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi.

1. **Komunikasi**

Menurut **Edward III**, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

- a) Dimensi transmisi (*transmission*) menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementor*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang transmisikan kepada pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang dimaksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta

dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber daya

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi menurut Edward dikatakan sebagai

“kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur birokrasi

Menurut **Edward** struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: Standard Operational Procedure (SOP) adalah berfungsi untuk menyegarkan tindakan dan kesamaan dalam penerapan aturan, atau standaroperasional prosedur (SOP) merupakan serangkaian aturan tertulis untuk mengikat seluruh komponen yang berada dalam suatu perusahaan. Ini dibutuhkan agar supaya dapat menghindari hal-hal yang menyimpang baik yang dilakukan oleh actor yang berperan (karyawan) ataupun semua pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepada beberapa badan yang berbeda sehingga dapat memerlukan koordinasi.

2. Pengertian Keterbukaan

Menurut David Beetham dalam Suharno, dkk. (2006: 16) keterbukaan adalah pemberitahuan informasi aktual yang dilakukan oleh pengambil kebijakan kepada masyarakat dengan jelas, nyata, dan dilakukan untuk penyampaian atas kepentingan-kepentingan bersama, misalnya tentang tanggapan, kritik dan saran dari masyarakat. Maka terbuka atau transparan memiliki arti jernih, jelas, nyata, dan mudah dipahami. Keterbukaan menunjukkan pada tindakan berbagai kebijakan dalam suatu persoalan dengan tujuan memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Sikap keterbukaan akan memberikan jaminan jika dilaksanakan secara konsisten dan utuh. Misalnya, penyelenggaran pemerintah harus jelas dan diketahui publik baik perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggung jawaban.

Keterbukaan adalah keadaan mampu berpartisipasi dalam urusan negara. Tersedianya informasi yang dapat dibagikan dan diperoleh oleh masyarakat umum disebut dengan keterbukaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak terlepas dari adanya keterbukaan. Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, menjadi semakin sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk membuang dan mengatur semua data yang masuk. Akibatnya, era keterbukaan akan muncul secara tidak langsung dalam penyusutan ruang dan waktu. menurut Pasal 28 F UU Nomor. Undang Uundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala macam saluran yang tersedia” Negara dituntut untuk lebih aktif dalam menyaring dan mengontrol setiap informasi yang masuk. dalam penyusutan ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam menyaring dan mengontrol setiap informasi yang masuk.

3. Pengertian Informasi

Menurut Siagian (2008:46) mengemukakan bahwa informasi telah menyentuh seluruh segi kehidupan dan penghidupan, baik pada tingkat individual, tingkat kelompok, dan tingkat organisasi. Pada tingkat individual misalnya, aneka ragam informasi dibutuhkan termasuk informasi tentang pendidikan, kesehatan, situasi pasar sebagai produk yang diperlukannya untuk memuaskan kebutuhannya, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Identifikasi dan pengenalan-pengenalan sumber-sumber informasi yang pantas dan layak digarap harus semakin relevan untuk diperhatikan agar menjamin bahwa data yang dikumpulkan untuk diolah bermutu tinggi dan proses penciptaan informasi tersebut harus diupayakan agar berlangsung dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam menciptakan informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi harus memenuhi persyaratan kelengkapan, kemutakhiran, kehandalan, terolah dengan baik tersimpan dengan rapih dan mudah ditelusuri dari tempat penyimpanannya apabila diperlukan persyaratan-persyaratan tersebut hanya mungkin terpenuhi apabila data, yang merupakan bahan baku untuk informasi, digali dari sumber-sumber yang tepat dan dengan mutu yang tinggi.

Informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggaraan dan penatausahaan badan publik lainnya yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh badan publik sesuai dengan Undang-Undang tentang Komisi Informasi Publik dan informasi terkait lainnya (pasal 1;2 UU Komisi informasi publik). Semua informasi publik bersifat terbuka, kecuali yang dinyatakan dikecualikan, sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Komisi Informasi Publik. Adapun informasi yang dikecualikan itu adalah :

- a. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum.
- b. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat.
- c. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.
- d. Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
- e. Informasi dapat merugikan ketahanan ekonomi Nasional.
- f. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar Negeri.
- g. Informasi yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.
- h. Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi. (menurut Zulaikha & Paribrata, 2017).

Menurut Gordon B. Davis mengatakan bahwa informasi adalah data yang telah diproses kedalam suatu bentuk yang

mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau untuk keputusan mendatang. Norbert Wiener (1950 : 70) menjelaskan bahwa informasi adalah nama untuk kegiatan terhadap apa yang ditukar-menukarkan dengan dunia luar sehingga kita dapat menyesuaikan diri terhadapnya dan berdasarkan informasi tersebut memang merasakan bahwa penyesuaian terjadi karenanya. Dari beberapa pendapat diatas, menunjukkan bahwa informasi itu mempunyai pengertian suatu proses yang diawali dari data dan fakta, kemudian mampu dipahami maknanya oleh si penerima. Karena informasi itu berperan dalam komunikasi, maka agar efektif harus diperhatikan dan dirinci sistem informasi. Informasi bersumber dari beberapa hal, seperti kegiatan-kegiatan pendapat masyarakat, kegiatan penelitian, data ilmiah, dan lain-lain yang kemudian diolah sampai menjadi informasi yang dapat digunakan.

4. Pengertian Informasi Publik

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi (2013:2) mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengelolaan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Menurut HiroTugiman (1996 :32) informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi ini menggambarkan suatu kejadian

nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber informasi adalah data, yang dapat berbentuk simbol, alfabet, huruf, angka, suara sinyal, gambar-gambar dan sebagainya. Menurut E . Koswara (1998 :157) informasi merupakan sumber daya yang strategis sepanjang hidup kita. Sebagai Negara berkembang, informasi merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses, informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma kedalam informasi tersebut, informasi pemerintah yang benar (valid dan sah) dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidak pastiaan serta mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan terjadi. Jadi informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan apa adanya. Tetapi harus sudah diproses, diolah, dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada pihak tertentu. Sebagai abdi masyarakat maka para administrator publik hendaknya menjadi pencari informasi dan sumber informasi bagi masyarakatnya, menurut Inu Kencana Syaffi (2007:99).

Kewajiban menyebarkan luaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi terkait. Secara ringkas ini manfaat teknologi informasi dan komunikasi bagi proses adminstarsi, pengelolaan atau pengurusan negara menurut Samodra Wibawa (2012:149):

a. Transparansi: politik dan administrasi (dalam arti sempit)

menjadi lebih terbuka, kecurigaan antar actor berkurang; meskipun kemudian pertengkaran antar actor juga dapat lebih leluasa ditonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.

- b. Partipasi: tersampainya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat baik pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan berpendapat, bersuara, dan bernegosiasi juga menjadi lebih terekspresikan. Masyarakat mempunyai *power* Yang lebih tinggi.
- c. Efisiensi: dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakatjuga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkaskan.

Sedangkan pengertian publik diutarakan menurut Scott M. Cutlip, Allen H. Center publik dan Glen M. Broom dalam bukunya *Effective public relations* Edisikesembilan yaitu: “publik relations adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individual dan organisasi yang punya kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan program aksi dalam rangka mendapat pemahaman dan penerimaan publik” (Cutlip dan Center, 2007:5),

Kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. Menurut Riswandi (2009:27) publik adalah kumpulan orang-orang yang sama minat dan kepentingan terhadap suatu isu. Publik tidak sama dengan umum, karena publik ditandai oleh adanya sesuatu isu yang dihadapi dan dibicarakan oleh kelompok kepentingan yang dimaksud, yang menghasilkan terbentuknya opini

mengenai isu tersebut. Istilah publik bersifat kontroversial dan di dalamnya terdapat proses diskusi. Definisi lain, politik diidentikkan dengan masyarakat. Publik disini berarti masyarakat madani baik itu pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari publik atau sekelompok masyarakat yang diberi kewenangan untuk menjalankan amanah publik, menurut Yogi Suprayogi Sugandi (2011:33).

Pengertian informasi publik diutarakan oleh beberapa ahli yaitu menurut Suryanto (2000:6) dalam jurnal Ade Suhendar, informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan. Menurut undang-undang keterbukaan informasi sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

5. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang diresmikan pada 30 April 2010 kemudian mulai diberlakukan pada 1 Mei. (Aritonang, Jurnal Komunikasi, No. 3: 261) Adanya perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik berlandaskan pada salah satu bentuk upaya untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. kebijakan Keterbukaan Informasi Publik ini sangat tepat diberlakukan di Indonesia mengingat Indonesia merupakan Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Selain itu, dijalankannya kebijakan terkait

dengan keterbukaan informasi publik juga merupakan perwujudan dari tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hadirnya kebijakan keterbukaan informasi publik oleh badan publik tentu akan memudahkan setiap individu atau kelompok dalam suatu wilayah atau daerah untuk mengakses setiap informasi yang dibutuhkannya. Adanya kemudahan tersebut tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi rakyat dengan demikian konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia yang menitik beratkan pada rakyat yakni dari rakyat oleh rakyat oleh rakyat dapat tercapai.

Terdapat beberapa tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan informasi publik adalah:

- a. menjamin hak masyarakat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh badan publik dari mulai perencanaan program kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik hingga pengambilan keputusan publik.
- b. mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik.
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik sehingga adanya transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- d. agar publik mengetahui alasan dari kebijakan publik yang mempengaruhi orang banyak.
- e. dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
- f. menjadi acuan bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sehingga menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

6. Kebijakan keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah. Kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Febrianingsih Nunuk (2012:136), informasi baik pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit untuk dijangkau masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jaminan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terhadap semua orang dalam memperoleh informasi dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 61 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 berlaku dalam seluruh wilayah Indonesia sehingga segala hak dan kewajiban orang atas informasi publik dan kewajiban orang atas informasi publik atau pemohon dan pengguna informasi publik dan badan publik baik yang ada di tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten yang ditetapkan dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik tersebut berlaku secara nasional diseluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintah kota/kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, dan diberikannya peluang jaminan keterbukaan informasi publik di daerah untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan terkait lainnya, maka dibentuklah peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Jayawijaya.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik, masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sepanjang informasi publik yang diperolehnya tersebut bukan informasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk diberikan atau diumumkan akan membahayakan kepada kepentingan publik atau meresahkan kehidupan masyarakat.

Menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:
2. setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, meliputi ;
 - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undang.
3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi

Publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

4. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
5. Cara-cara yang ditentukan lebih lanjut oleh pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan
- h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan
 - d. alasan penolakan permintaan informasi.
1. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik:
 - a. menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
 2. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional.

Informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan

- laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
 - e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/ dewan pengawas dan direksi;
 - f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/ dewan pegawai;
 - g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai informasi publik;
 - h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajiban;
 - i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
 - j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
 - k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
 - l. kegiatan penugasan pemerintah dan kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
 - m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan
 - n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Dari ketiga penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan analisis penulis dalam melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas komunikasi dan informatika di Kabupaten Jayawijaya maka didalam penelitian ini dicatumkan hasil-hasil penelitian yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Tabel 2.1
Matriks penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Indikator	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Zulaikha, Z. & Paribrata, A.I.	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. Adapun indikatornya: a. Implementasi b. Keterbukaan Informasi c. Satuan kerja perangkat daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pemerintah kabupaten atau kota, implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini mengalami perkembangan yang menggembirakan, tetapi tidak demikian dengan satuan kerja perangkat daerah.	Jurnal Studi Komunikasi, Vol. 1 Ed 2, July 2017 Page131-162
2.	Agus Setiawan, Dadang Sugiana, Jimi Narotama M.	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Adapun Indikatornya: a. Keterbukaan informasi b. Pemanfaatan informasi c. Pemerintah d. Kebijakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kota Bandung kurang atau belum memahami keterbukaan informasi publik, bahkan sebagian besar warga kota belum atau kurang memahami bentuk informasi yang	Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, Hlm. 196-205

			digunakan oleh pemkot sebagai upaya implementasi keterbukaan informasi publik.	
3.	Surahman, M. Akmal, M. Nazaruddin	Implementasi Good Governance di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 pada Pelayanan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Adapun indikatornya: a. Implementasi b. Good Governance c. Akta Jual Beli Tanah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan Gajah Putih khususnya pada pelayanan pembuatan Akta Jual Beli Tanah belum berjalan sesuai dengan prinsip good governance dengan azas efektif dan efisien.	Jurnal Transparan Publik, Vol. 1, No. 1, Month 2021, 20-28

C. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari variabel implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah penerapan layanan pemerintah daerah berbasis internet pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupten Jayawijaya, dengan indikator yang akan diteliti adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun definisi operasional dari indikator tersebut:

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu proses penyampaian informasi Publik di Dinas Komunikasi dan informatika di Kabupaten Jayawijaya baik dengan menggunakan media sosial maupun media cetak sehingga mendapatkan kejelasan, tranmisi dan konsistensi dalam menyampaikan informasi kepada publik.

2. Sumber daya

Sumber daya yaitu komponen dan peran penting dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam melengkapi barang dan jasa berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Jayawijaya.

3. Disposisi

Disposisi yaitu kemauan atau kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang merupakan kordinasi Sturuktur pelaksan, komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, maupun tugas pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas untuk unit-unit pelaksana, hubungan, komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga sulit bagi organisasi untuk mengevaluasi pekerjaan, karena komunikasi adalah

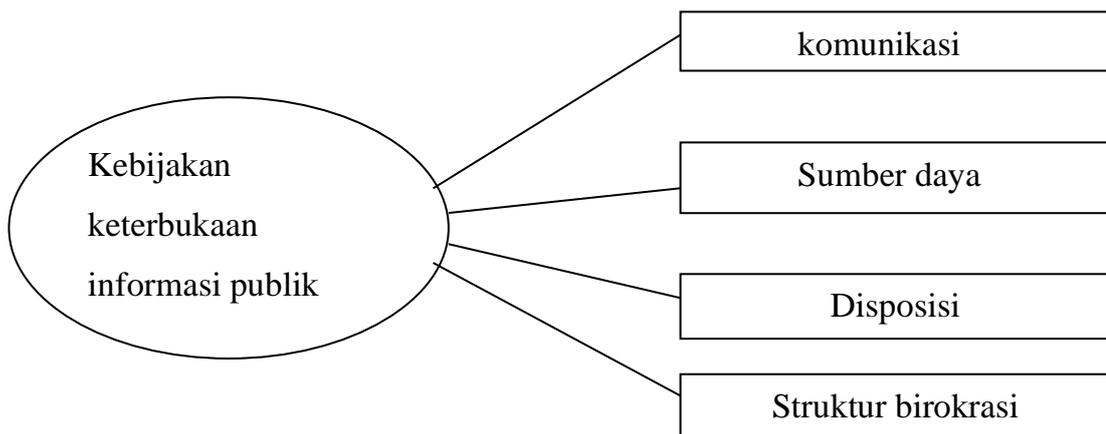
sumber informasi bagi pimpinan atau eksekutif dalam menghasilkan berbagai kebijakan.

D. Kerangka konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat di lihat pada gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1

Kerangka konseptual penelitian



Pada gambar 2.1 kerangka konseptual penelitian di atas, untuk memahami kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas komunikasi dan informatika di Kabupaten Jayawijaya melalui indikator-indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Menurut George Edward III dalam Kapahang et al., (2020)

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena ingin mengetahui sejauh mana Sistem Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Jayawijaya, Jl. Thamrin Wamena – 99511.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu selama \pm 2 (dua) Bulan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut sugiyono (2019;11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008;90) bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan kareteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dengan demikian populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai informasi dan komunikasi yang berjumlah 33 orang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008 :91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel hendaknya memperhitungkan berbagai aspek karena kesimpulan dari hasil penelitian yang dipelajari melalui sampel harus dapat di berlakukan pula untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil harus representatif, sehingga betul –betul mewakili keseluruhan populasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan totaling sampling. Menurut pendapat Suharsimi Arikunto, (2006 : 131), mengatakan bahwa bila populasi kurang dari 100, maka dapat diambil semua sebagai sampel. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 orang.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survey. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua instrument penelitian yaitu Kuesioner dengan menggunakan Skala Likert, Menurut Sugiyono (2009;107), Skala Likert di gunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial dengan kategori sebagai berikut.

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Sangat Baik | Nilai Skor=5 |
| 2. Baik | Nilai Skor=4 |
| 3. Kurang Baik | Nilai Skor=3 |
| 4. Tidak Baik | Nilai Skor=2 |
| 5. Sangat Tidak Baik | Nilai Skor=1 |

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2000: 134) yaitu Metode pengumpulan data adalah teknis atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data, melalui angket (kuisisioner), wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data yang dilakukan dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian pustaka

Penelitian pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku-buku, diktat bahan kuliah dan sebagainya yang bersangkutan dengan judul yang penulis ambil.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah melakukan pengamatan secara langsung pada tempat yang menjadi objek penelitian, dengan cara sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Soestrisno dan Sugiyono (2008 :160), mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis atau dapat dikatakan pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian.

b. Angket (kuesioner)

Menurut Sugiyono (2008 : 162) kuesioner adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar atau membagi daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa kepada responden.

c. Wawancara tidak terstruktur

Menurut sugiyono (2007 : 412) wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan.

F. Teknis Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis skor pada skala ordinal. Dalam menentukan kategori jawaban responden di gunakan jumlah skor ideal (maksimum) serta jumlah skor terendah

- Jumlah Skor Ideal = 5 x jumlah responden
= 5 x 33
= 165
- Jumlah Skor Rendah = 1 x jumlah responden
= 1 x 33
= 33

Berdasarkan Jumlah Skor Ideal (165) dan jumlah skor rendah (33) maka table interpretasi skor sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nilai Interpretasi Skor.

No	Interval Jumlah Skor	Predikat
1	$132 < \text{jumlah skor} \leq 165$	Sangat Baik
2	$99 < \text{jumlah skor} \leq 132$	Baik
3	$66 < \text{jumlah skor} \leq 99$	Kurang Baik
4	$33 < \text{jumlah skor} \leq 66$	Tidak Baik
5	$1 < \text{jumlah skor} \leq 33$	Sangat Tidak Baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Lokasi Penelitian

Adapun uraian dari keadaan lokasi penelitian yakni Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya diantaranya meliputi, sejarah, letak geografis, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta sumber daya manusia, sebagai berikut:

a. Sejarah

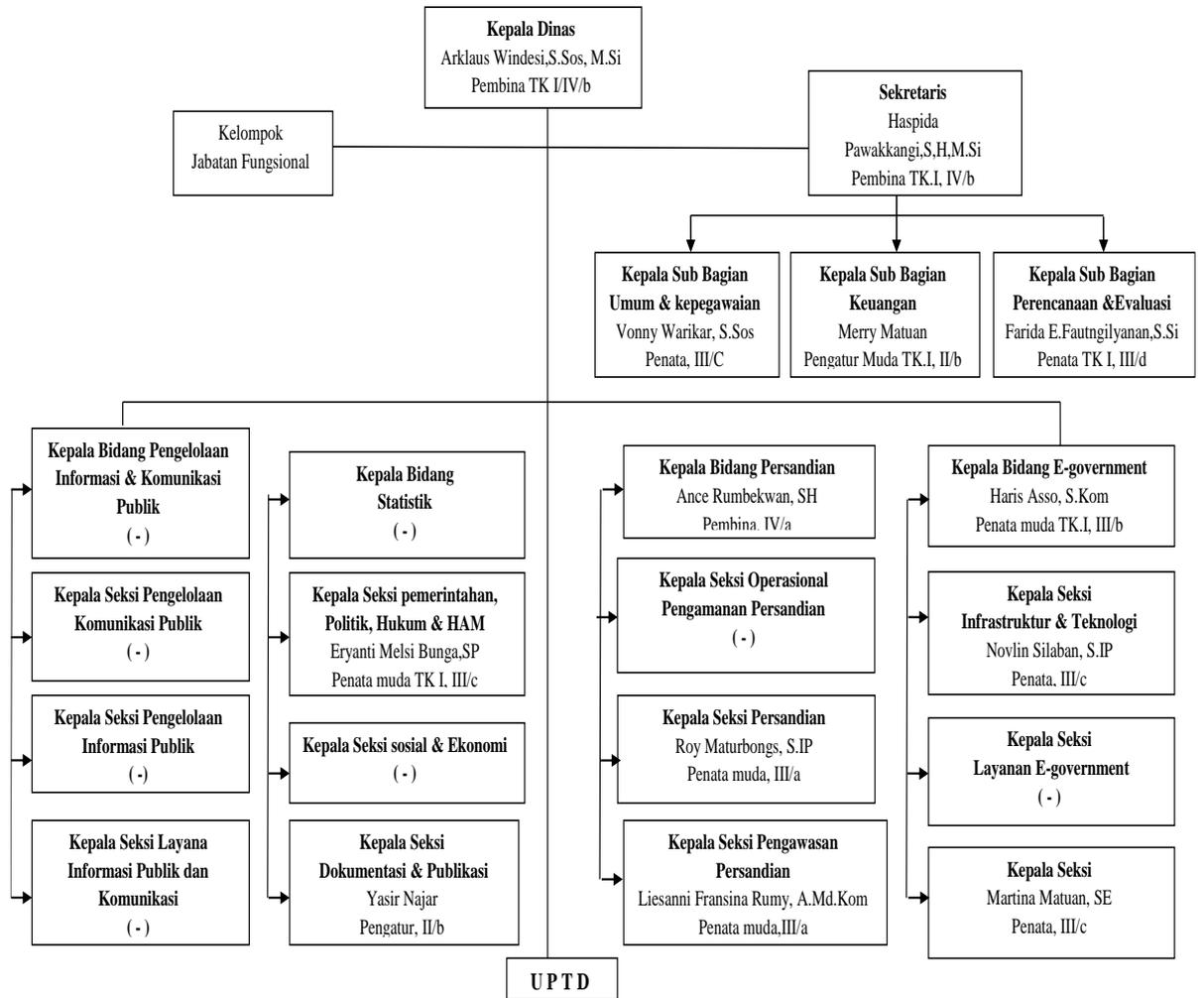
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang kian pesat yang mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi pelayanan publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, cepat, transparan dan mudah, maka Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mempunyai keinginan kuat untuk membangun sistem pelayanan publik berbasis elektronik dengan mendirikan Dinas Komunikasi dan Informasi guna merealisasikan e-government itu sendiri. Dinas Komunikas dan Informasi Kabupaten Jayawijaya resmi didirikan pada Tahun 2017 yang mangacu pada peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya. Dinas komunikasi dan infromasi merupakan unsur bidang e-government, komunikas dan informasi, persandian dan statistik yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Sebelum dibentuknya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya fungsi komunikasi dan informatika berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten dibawah koordinasilangsung dari sekretaris Daerah. Dengan melihat kebutuhan mendesak akan realisasi e-government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya yang mengisi sektor pembangunan sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan yang efisien, efektif,transparan dan partisipatif.

b. Letak Geografis

Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya sebelumnya berada dilingkungan Kantor Bupati Jayawijaya Jl. Yos Sudarso.Namun akibat dari kerusuhan yang terjadi pada Tanggal, 23 September 2019 yang menyebabkan terbakarnya Kantor Bupati Jayawijaya beserta dengan Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi itu sendiri maka saat ini Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya berkantor sementara di Jl. Thamrin Wamena.Secara geografis Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya berada pada 4°06'01.3"lintang selatan, 138°56'41.1"E, berada ditengah Kota Wamena dan berada dilingkungan Kantor Instansi Pemerintahan.

c. Struktur Organisasi



Sumber : Renstra Dinas Kominfo

keterangan:

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya mempunyai unsur dibidang penyelenggaraan komunikasi dan informasi, persandian dan statistic yang dipimpin oleh Kepala Dinas Yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Jayawijaya. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya yang mempunyai tugas pokok yaitu “Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Dibidang Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugass Pembantuan”. (Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun 2018-2023).

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan dibidang e-government, komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;

- b. Penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dilingkungan pemerintah daerah serta tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan informasi melalui pengumpulan dan analisis data informasi dan penyebaran informasi;
- e. Pelaksanaan kerjasama telekomunikasi informasi dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aspek telematika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian informasi;
- g. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai wewenang sebagai berikut :

a) Tupoksi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.

b) Tupoksi Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program serta keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi umum dan kepegawaian dinas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pementauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan dinas;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan keijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dinas;
- d. Melakukan tugas lainyang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan dan
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Adapun tugas pokok dan fungsi sub-sub bagian sebagai berikut :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas mengelola surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan, dan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b) Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- c) Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- d) Melaksanakan administrasi penyuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- e) Mengelola sarana prasarana perkantoran, melkaukan urusan rumah tangga, keprotokalan dan kehumasan.

- b) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan

keuangan. Untuk menjalankan tugas pokok, sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang keuangan;
2. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan dan perlengkapan;
3. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;
4. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
5. Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dibidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan tata laksana dan kerjasama. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, sub bagian perencanaan dan evaluasi mempunyai fungsi :

1. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan penganggaran, tata laksana dan kerjasama;
2. Menyusun bahan penyusunan norma, standard an prosedur dibidang perencanaan dan penganggaran, tata laksana dan kerjasama;
3. Menyusun dokumen perencanaan meliputi, renstra, rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Dinas;
4. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tata laksana dan kerjasama;
5. Menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
6. Menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Komunikasidan Informatika;
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupoksi dan peraturan yang berlaku;

c) Tupoksi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas komunikasi dan informatika dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
2. Dalam menjalankan tugas tersebut bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis dan pelaporan dibidang pengelolaan informasi publik;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan komunikasi publik;
 - c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan informasi publik dan hubungan media;
 - d) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1) bidang pengelolaan informasi dan komunikasi secara administrative dikoordinasikan oleh sekretaris dinas;
4. Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik membawahi : seksi pengelolaan informasi publik, seksi pengelolaan komunikasi publik, seksi layanan informasi publik dan hubungan media.

d) Tupoksi Bidang Penyelenggaraan E-Government

1. Bidang penyelenggaraan e-government mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas komunikasi dan informatika dibidang penyelenggaraan e-government;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1) diatas, bidang e-goveerment menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang infrastruktur dan teknologi;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan, pengelolaan data dan aplikasi;

- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang e-government;
 - d) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), bidang e-government secara administratif di koordinasikan oleh sekretaris dinas;
 4. Bidang penyelenggaraan e-government membawahi, seksi infrastruktur dan teknologi, seksi pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi, dan seksi layanan e-government.

e) Tupoksi Bidang Persandian

1. Bidang persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informasi dibidang persandian;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), bidang persandian menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah;
 - b) Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian dan jarring

komunikasi sandi, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;

- c) Pengelolaan informasi berklasifikasi;
- d) Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- e) Pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis sesuai kebutuhan daerah;
- f) Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian jaringan komunikasi sandi;
- g) Pelaksanaan operasional pemanan komunikasi sandi;
- h) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian diseluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i) Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi Pembina persandian;
- j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), bidang persandian secara administrative dikoordinasikan oleh sekretaris Dinas;

4. Bidang persandian membawahi, seksi tata kelola persandian, seksioperasional persandian, dan seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

f) Tupoksi Bidang Statistik

1. Bidang statistic mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informasi dibidang statistic;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), bidnag statistic menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang statistic sosial ekonomi;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang statistik pemerintahan, politik, hokum dan HAM;
 - c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang dokumentasi dan publikasi statistik;
 - d) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan peeraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1, bidang statistik secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Dinas;
4. Bidang statistik membawahi, seksi sosial ekonomi, seksi pemerintahan, politik dan HAM, seksi dokumentasi dan publikasi.

2. Keadaan Responden

Keadaan responden yang diteliti yaitu jenis kelamin, agama, umur, jabatan, masa kerja, pangkat, golongan, pendidikan terakhir, keadaan responden tersebut disajikan sebagai berikut:

a. Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin Tabel 4.1

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi%
1.	Laki-Laki	13	39,40
2.	Perempuan	20	60,6
Jumlah		33	100

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13 orang atau 39,40% responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 20 orang atau 60,6%.

b. Keadaan Responden Menurut Agama
Tabel 4.2

NO	Agama	Frekuensi	Presentasi%
1.	Islam	4	12,12
2.	Protestan	17	51,52
3.	Katolik	12	36,36
Jumlah		33	100

umber Data : Data Primer Tahun2023

Pada tabel 4.3 tersebut bahwa jumlah responden yang beragama islam sebanyak 4 atau 12,12%, beragama protestan sebanyak 17 Atau 51,52% dan beragama katolik sebanyak 12 atau 36,36%.

c. Keadaan Responden Menurut Usia
Tabel 4.3

NO	Usia	Frekuensi	Presentasi%
1.	20 – 35 tahun	18	54,55
2.	36 – 45 tahun	8	24,24
3.	46 – 55 tahun	3	9,09
4.	56 – 60 tahun	4	12,12
Jumlah		33	100

sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.4 diatas bahwa jumlah responden yang berusia dikisaran 20 – 35 tahun, 18 atau 54,55%, berusia

dikisaran 36 – 45 tahun, 8 atau 24,24%, berusia dikisaran, 46 -55 tahun, 3 atau 9,09%, berusia dikisaran 56 – 60 tahun, 4 atau 12,12%.

d. Keadaan Responde Menurut Jabatan

Tabel 4.4

NO	Jabatan	Frekuensi	Presentasi
1.	Kepala Dinas	1	3,03
2.	Sekretaris	1	3,03
3.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	3,03
4.	Bidang Penyelenggaraan e-Government	-	
5.	Bidang Statistik Sektoral	-	
6.	Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	1	3,03
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	3,03
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	3,03
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	1	3,03
10.	Seksi Pengelolaan Informasi Publik	-	
11.	Seksi Komunikasi Publik	-	
12.	Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	-	

13.	Seksi Infrastruktur dan Teknologi	1	3,03
14.	Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi	1	3,03
15.	Seksi layanan e-Government	-	
16.	Seksi Pengumpulan Data Statistik	1	3,03
17.	Seksi Pengolahan dan Analisa Data Statistik	-	
18.	Seksi Penyajian, Evaluasi dan Pelaporan Data Statistik	1	3,03
19.	Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian	1	3,03
20.	Seksi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	1	3,03
21.	Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Keamanan Informasi dan Persandian	-	
22.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	
23.	UPTD	-	
24.	Staf PNS	12	36,37
25.	Staf Tenaga Kontrak	7	21,21
26.	Staf Tenaga IT	1	3,03
Jumlah		33	100

Sumber Data: Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.5 diatas bahwa jumlah responden yang jabatan kepala dinas, sebanyak 1 atau 3,03%, jabatan sekretaris sebanyak 1 atau 3,03%, jabatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebanyak 1 atau 3,03%, jabatan bidang keamanan informasi dan persandian sebanyak 1 atau 3,03%, jabatan kepala sub bagian umum dan kepegawaian sebanyak 1 atau 3,03%, jabatan kepala sub bagian keuangan sebanyak 1 atau 3,03%, jabatan kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi sebanyak 1 atau 3,03%, jabatan seksi infrastruktur dan teknologi sebanyak 1 atau 3,03%, jabatan seksi pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi sebanyak 1 atau 3,03%, jabatan seksi pengumpulan data statistik sebanyak 1 atau 3,03%, jabatan seksi penyajian, evaluasi dan pelaporan data statistik sebanyak 1 atau 3,03%, jabatan seksi tata kelola keamanan informasi dan persandian sebanyak 1 atau 3,03%, jabatan seksi layanan keamanan informasi dan persandian sebanyak 1 atau 3,03%, jabatan staf pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 12 atau 36,36%, jabatan staf tenaga kontrak sebanyak 7 atau 21,21% dan jabatan staf tenaga informasi dan teknologi(IT) sebanyak 1 atau 3,03%.

e. Keadaan Responden Menurut Masa Kerja

Tabel 4.5

NO	Masa Kerja	Frekuensi	Presentasi%
1.	1 – 10 tahun	17	51,52
2.	11 – 20 tahun	10	30,30
3.	21 – 30 tahun	6	18,18
Jumlah		33	100

Sumber data: data primer tahun 2023

Pada tabel 4.5 diatas bahwa jumlah responden yangmasa kerja 1-10 tahun sebanyak 17 atau 51,52%, masa kerja 11-20 tahun sebanyak 10 atau 30,30% dan masa kerja 21- 30 tahun 6 atau 18,18%.

f. Keadaan Responden Menurut Pangkat

Tabel 4.6

NO	Pangkat	Frekuensi	Persentasi%
1.	Pembina TK.1	2	8
2.	Pembina	1	4
3.	Penata	3	12
4.	Penata TK 1	2	8
5.	Penata Muda	6	24
6.	Penata muda TK.1	3	12
7.	Pengatur	2	8
8.	Pengatur TK.1	1	4
9.	Pengatur Muda	2	8
10.	Pengatur muda TK.1	3	12
Jumlah		25	100

Sumber Data: Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.7 diatas bahwa jumlah responden yang berpangkat Pembina TK. 1 sebanyak 2 atau 8%, berpangkat Pembina sebanyak 1 atau 4%, berpangkat penata sebanyak 3 atau 12%, berpangkat penata TK.1sebanyak 2 atau 8%, berpangkat muda sebanyak 6 atau 24%, berpangkat penata muda TK.1 sebanyak 3 atau 12%, berpangkat pengatur sebanyak 2 atau 8%, berpangkat pengatur TK.1 sebanyak 1 atau 4%, berpangkat pengatur

muda sebanyak 2 atau 8%, berpangkat pengatur muda TK.1 sebanyak 3 atau 12%.

g. Keadaan Responden Menurut Golongan

Tabel 4.7

NO	Golongan	Frekuensi	Presentasi%
1.	I	-	0
2.	II	7	28
3.	III	15	60
4.	IV	3	12,5
Jumlah		25	100

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.8 diatas bahwa jumlah responden yang golongan I sebanyak 0 atau 0%, golongan II sebanyak 7 atau 29,17%, golongan III sebanyak 14 atau 58,33% dan golongan IV sebanyak 3 atau 12,5%.

h. Keadaan Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Tabel 4.8

NO	Pendidikan	Frekuensi	Predikat
	SMA	11	33,33
	SI	19	57,58
	S2	3	9,09
Jumlah		33	100

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa responden yang menurut pendidikan dengan tingkat jumlah responden pendidikan SMA sebanyak 11 Atau 33,33%, pendidikan S1 sebanyak 19 atau 57,58%, pendidikan S2 sebanyak 3 Atau 9,09%.

3. Analisa Data

Analisa data menggunakan perhitungan skor, dimulai dari penilaian terhadap masing-masing pertanyaan yang terdapat pada setiap indikator dari hasil pengolahan kuesioner diperoleh data-data tentang Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jayawijaya yang dapat disajikan sebagai berikut.

a. Indikator Komunikasi

Indikator ini terdiri dari 4 pertanyaan yang disajikan dan dijelaskan sebagai berikut pada tabe 4.9

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Terkait Tentang
Penyampaian Informasi Publik Secara Cepat

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	4	20
2.	Baik	4	24	96
3.	Kurang baik	3	5	15
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	131

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.9 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 4 responden atau nilai skor 20, yang menjawab baik 24 responden atau nilai skor 96, yang menjawab kurang baik 5 responden atau nilai skor 15, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 131 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

Tabel 4.10
Tanggapan responden Tentang Kebijakan
Keterbukaan Informasi Sudah Disosialisasikan
Kepada Masyarakat

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	4	20
2.	Baik	4	24	96
3.	Kurang baik	3	5	15
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	131

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.10 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 4 responden atau nilai skor 20, yang menjawab baik 24 responden atau nilai skor 96, yang menjawab kurang baik 5 responden atau nilai skor 15, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 131 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terkait Pegawai Memahami
Tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	3	15
2.	Baik	4	23	92
3.	Kurang baik	3	7	21
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	128

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.11 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 3 responden atau nilai skor 15, yang menjawab baik 23 responden atau nilai skor 92, yang menjawab kurang baik 7 responden atau nilai skor 21, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 128 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Terkait Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Telah
Melakukan Koordinasi Secara Rutin

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	4	20
2.	Baik	4	19	76
3.	Kurang baik	3	9	27
4.	Tidak baik	2	1	2
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	125

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.12 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 4 responden atau nilai skor 20, yang menjawab baik 19 responden atau nilai skor 76, yang menjawab kurang baik 9 responden atau nilai skor 27, yang menjawab tidak baik 1 responden atau nilai skor 2, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 125 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

b. Indikator Sumber Daya

Indikator ini terdiri dari 5 pertanyaan yang disajikan dan dijelaskan sebagai berikut

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Tentang Tersedia
Sarana Dalam Mendukung Kebijakan Keterbukaan
Informasi Publik

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	1	5
2.	Baik	4	17	68
3.	Kurang baik	3	15	45
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	118

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.13 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 1 responden atau nilai skor 5, yang menjawab baik 17 responden atau nilai skor 68, yang menjawab kurang baik 15 responden atau nilai skor 45, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 118 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

Tabel 4.14
Tanggapan Responden Tentang Tersedia Sumber
Daya Manusia Dalam Mendukung Kebijakan
Keterbukaan Informasi Publik

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	2	10
2.	Baik	4	19	76
3.	Kurang baik	3	12	36
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	122

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.14 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 2 responden atau nilai skor 10, yang menjawab baik 19 responden atau nilai skor 76, yang menjawab kurang baik 12 responden atau nilai skor 36, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 122 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Tentang Pegawai Memiliki
Keahlian Dalam Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan
Informasi Publik

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	2	10
2.	Baik	4	24	96
3.	Kurang baik	3	7	21
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	127

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.15 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 2 responden atau nilai skor 10, yang menjawab baik 24 responden atau nilai skor 96, yang menjawab kurang baik 7 responden atau nilai skor 21, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 127 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Tentang Tersedia Dana Dalam
Menyampaikan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	4	20
2.	Baik	4	15	60
3.	Kurang baik	3	14	42
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	122

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.16 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 4 responden atau nilai skor 20, yang menjawab baik 15 responden atau nilai skor 60, yang menjawab kurang baik 14 responden atau nilai skor 42, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 122 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

Tabel 4.17
Tanggapan Responden Tentang Tersedia Sumber Informasi Dari Dinas-Dinas Terkait Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	3	15
2.	Baik	4	17	68
3.	Kurang baik	3	12	36
4.	Tidak baik	2	1	2
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	121

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.17 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 3 responden atau nilai skor 15, yang menjawab baik 17 responden atau nilai skor 68, yang menjawab kurang baik 12 responden atau nilai skor 36, yang menjawab tidak baik 1 responden atau nilai skor 2, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 121 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

c. **Indikator Disposisi /sikap**

Indikator ini terdiri dari 5 pertanyaan yang disajikan dan dijelaskan sebagai berikut

Tabel 4.18
Tanggapan Responden Tentang Pegawai Bertanggung Jawab Dalam Mengerjakan Pekerjaannya

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	5	25
2.	Baik	4	13	52
3.	Kurang baik	3	15	45
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	122

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.18 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 5 responden atau nilai skor 25, yang menjawab baik 13 responden atau nilai skor 52, yang menjawab kurang baik 15 responden atau nilai skor 45, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 122 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

Tabel 4.19

**Tanggapan Responden Tentang Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informasi Sangat Adil Dalam
Memberikan Tugas Kepada Pegawainya**

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	14	70
2.	Baik	4	17	68
3.	Kurang baik	3	2	6
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	144

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.19 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 14 responden atau nilai skor 70, yang menjawab baik 17 responden atau nilai skor 68, yang menjawab kurang baik 2 responden atau nilai skor 6, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 144 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikatsangat baik.

Tabel 4.20
Tanggapan Responden Tentang Pegawai Sangat
Disiplin Dalam Waktu

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	0	0
2.	Baik	4	10	40
3.	Kurang baik	3	23	69
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	109

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.20 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 0 responden atau nilai skor 0, yang menjawab baik 10 responden atau nilai skor 40, yang menjawab kurang baik 23 responden atau nilai skor 69, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 109 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

Tabel 4.21

**Tanggapan Responden Tentang Pegawai Konsisten
Dalam Melaksanakan Tugas**

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	4	20
2.	Baik	4	14	56
3.	Kurang baik	3	15	45
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	121

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.21 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 4 responden atau nilai skor 20, yang menjawab baik 14 responden atau nilai skor 56, yang menjawab kurang baik 15 responden atau nilai skor 45, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 121 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

Tabel 4.22
Tanggapan Responden Tentang Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informasi Sangat Adil Dalam
Memberikan Tugas Kepada Pegawainya

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	3	15
2.	Baik	4	19	76
3.	Kurang baik	3	11	33
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	124

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.22 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 3 responden atau nilai skor 15, yang menjawab baik 19 responden atau nilai skor 76, yang menjawab kurang baik 11 responden atau nilai skor 33, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 124 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

d. Indikator Struktur Birokrasi

Indikator ini terdiri dari 3 pertanyaan yang disajikan dan dijelaskan sebagai berikut

Tabel 4.23
Tanggapan Responden Terkait Dilaksanakannya Kebijakan Keterbukaan Informasi Sesuai Dengan Standar Operasional

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	3	15
2.	Baik	4	24	96
3.	Kurang baik	3	6	18
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	129

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.23 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 3 responden atau nilai skor 15, yang menjawab baik 24 responden atau nilai skor 96, yang menjawab kurang baik 6 responden atau nilai skor 18, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 129 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik

Tabel 4.24
Tanggapan Responden Terkait Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi Sudah Menetapkan
Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	2	10
2.	Baik	4	26	104
3.	Kurang baik	3	5	15
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	129

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.24 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 2 responden atau nilai skor 10, yang menjawab baik 26 responden atau nilai skor 104, yang menjawab kurang baik 5 responden atau nilai skor 15, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 129 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

Tabel 4.25
Tanggapan Responden Terkait Adanya Pembagian
Tugas Yang Jelas Dalam Menyebarluaskan Pekerjaan

NO	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1.	sangat baik	5	5	25
2.	Baik	4	23	92
3.	Kurang baik	3	5	15
4.	Tidak baik	2	0	0
5.	Sangat tidak baik	1	0	0
Jumlah			33	132

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.25 terlihat bahwa responden yang menjawab sangat baik 5 responden atau nilai skor 25, yang menjawab baik 23 responden atau nilai skor 92, yang menjawab kurang baik 5 responden atau nilai skor 15, yang menjawab tidak baik 0 responden atau nilai skor 0, dan yang menjawab sangat tidak baik 0 atau nilai skor 0. Jumlah skor dari pertanyaan ini adalah 132 jika diinterpretasikan termasuk dalam predikat baik.

A. Pembahasan

Berdasarkan analisa data, maka berikut ini dijelaskan pembahasan dari keempat indikator implementasi kebijakan, yaitu indikator komunikasi, sumber daya, disposisi/ sikap, dan struktur birokrasi yang disajikan sebagai berikut:

1. Indikator Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan, komunikasi yang

merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan publik maka implementasi yang efektif akan terlaksana apabila parapembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan informasi yang diketahui para pengambil keputusan yang bisa didapat melalui komunikasi yang baik (Agustino, 2014 : 150)

Program kebijakan memerlukan hubungan yang baik antara instansi terkait dengan pengambil manfaat melalui dukungan komunikasi dan koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi dan masyarakat bagi keberhasilan pelaksanaan suatu program.

Penilaian terhadap indikator komunikasi dilakukan dengan cara menghitung rata-rata skor dari keempat sub indikator yang disajikan pada tabel 4.26.

Tabel 4.26

Perolehan Nilai Skor Indikator Komunikasi

NO	Uraian Tugas	Jumlah Skor	Predikat
1.	Penyampaian informasi publik secara cepat	131	Baik
2.	Kebijakan keterbukaan informasi sudah disosialisasikan kepada masyarakat	131	Baik
3.	Pegawai memahami tentang kebijakan keterbukaan informasi publik	128	Baik
4.	Pejabat pebgelolah informasi dan dokumentasi (PPID) telah melakukan koordinasi secara rutin	125	baik
Jumlah		515	
Rata-rata		128,75	Baik

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.26 terlihat bahwa penyampaian informasi publik secara cepat memperoleh skor nilai 131 yang termasuk predikat baik, aspek kebijakan keterbukaan informasi sudah disosialisasikan kepada masyarakat memperoleh skor 131 yang termasuk predikat baik, aspek pegawai memahami tentang kebijakan keterbukaan informasi publik memperoleh skor 128 yang termasuk predikat baik, aspek pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) telah melakukan koordinasi secara rutin memperoleh skor 125 yang termasuk predikat baik. Nilai rata – rata indikator komunikasi adalah 128,75 dengan predikat baik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwakomunikasi dengan lintas sektoral selama ini kurang terjalin dengan baik, sehingga menyebabkan informasi yang keluar untuk menjadi konsumsi publik juga tidak selengkap yang seharusnya. Masyarakat sekarang dapat mengakses keterbukaan informasi publik melalui website Kabupaten yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya.

2. Indikator Sumber Daya

Sumber daya yang dapat member dukungan dalam pelaksanaan kebijakan agar dapat berwujud seperti sumber daya manusia dan sumber daya finansial sumber daya ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tanpa sumber daya kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak dan pelaksana kebijakan anggaran dibutuhkan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menjadi penghambat proses kebijakan.

Dalam mengimplementasi suatu kebijakan sumber daya memegang peranan penting dan menentukan keberhasilan kebijakan tersebut oleh karena itu dalam mengimplementasikan kebijakan harus didukung oleh aparat yang memadai kualifikasi (mutu) aparat sarana dan prasarana yang memadai begitu pula dengan dukungan dana operasional yang disediakan memadai.

Bahwa dalam suatu implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) sumber daya material (*material resources*) dan sumber daya metode (*method resources*) sumber daya yang paling penting dari ketiga sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan sekaligus juga sebagai objek faktor sumber daya ini memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, menurut Van Metter dan Van Horn (Nugroho 2014:628).

Penilaian terhadap indikator sumber daya dilakukan dengan cara menghitung rata – rata skor dari ke empat sub indikator yang disajikan pada tabel 4.27.

Tabel 4.27
Perolehan Nilai Skor Indikator Sumber Daya

NO	Uraian Tugas	Jumlah Skor	Predikat
1.	Tersedia sarana dalam mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik	118	Baik
2.	Tersedia sumber daya manusia dalam mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik	122	Baik
3.	Pegawai memiliki keahlian dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	127	Baik
4.	Tersedia dana dalam menyampaikan kebijakan keterbukaan informasi publik	122	Baik
5.	Tersedia sumber informasi dari dinas-dinas terkait kebijakan keterbukaan informasi publik	121	Baik
Jumlah		610	
Rata-rata		122	Baik

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.27 terlihat bahwa tersedia sarana dalam mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik memperoleh skor nilai 118 yang termasuk predikat baik, aspek tersedia sumber daya manusia dalam mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik memperoleh skor nilai 122 yang termasuk predikat baik, aspek pegawai memiliki keahlian dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik memperoleh skor nilai 127 yang termasuk predikat baik, aspek tersedia dana dalam menyampaikan kebijakan keterbukaan informasi publik memperoleh skor nilai 122 yang termasuk predikat baik, aspek tersedia sumber informasi dari dinas-dinas terkait kebijakan keterbukaan informasi publik memperoleh skor nilai 121 yang termasuk predikat baik. perolehan rata-rata skor untuk indikator sumber daya adalah 122 dengan predikat baik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dibidang teknologi dan informasi kurang mencukupi karena banyak pegawai yang keahlian atau gelarnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di Dinas Komunikasi dan Informatika, honorer hanya ada dua orang diketerbukaan informasi, kepala seksi dan kepala bidang tidak ada karena sudah pensiun, kekurangan jurnalis untuk mencari suatu berita, sarana prasarana yang kurang memadai ketika ada pejabat daerah yang kemana dan Dinas Komunikasi dan Informatika harus mengikuti untuk melakukan peliputan biasanya numpang karena secara teknis lapangan tidak mempunyai kendaraan dan peralatan seadanya.

3. Indikator Disposisi atau Sikap

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sarana karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asas program yang telah digariskan sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas dan wewenang fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan apabila implementor memiliki sikap yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang dapat diinginkan oleh pembuat kebijakan sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Mengemukakan kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang ada mempunyai konsekuensi penting bagi seluruh implementasi kebijakan yang efektif jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif adanya hanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar dalam implementasi kebijakan yang terlaksana sesuai dengan keputusan awal demikian sebaliknya jika para pelaksana bersikap negative atau menolak terhadap satu implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala penilaian terhadap indikator disposisi, dapat disajikan pada tabel 4.28

Tabel 4.28

Perolehan Nilai Skor Indikator Disposisi Atau Sikap

NO	Uraian Tugas	Jumlah Skor	Predikat
1.	Pegawai bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaannya	122	Baik
2.	Kepala Dinas komunikasi dan informasi sangat adil dalam memberikan tugas kepada pegawainya	144	Sangat Baik
3.	Pegawai sangat disiplin dalam waktu	109	Baik
4.	Pegawai konsisten dalam melaksanakan tugas	121	Baik
5.	Pegawai menjalankan tugasnya dengan maksimal/baik	124	Baik
Jumlah		620	
Rata-rata		124	Baik

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.28 terlihat bahwa aspek pegawai bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaannya menunjukkan perolehan skor 122 yang termasuk predikat baik, aspek kepala Dinas komunikasi dan informasi sangat adil dalam

memberikan tugas kepada pegawainya menunjukkan perolehan skor 144 yang termasuk predikat sangat baik, aspek pegawai sangat disiplin dalam waktu menunjukkan perolehan skor 109 yang termasuk predikat baik, aspek pegawai konsisten dalam melaksanakan tugas menunjukkan perolehan skor 121 yang termasuk predikat baik, aspek pegawai menjalankan tugasnya dengan maksimal/baik menunjukkan perolehan skor 124 yang termasuk predikat baik. perolehan rata-rata skor untuk indikator disposisi atau sikap 124 yang termasuk predikat baik.

4. Indikator Struktur Birokrasi

Menurut Mulyadi (2015:29) struktur birokrasi menekankan bahwa struktur menjadi penting dalam implementasi kebijakan aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur*(SOP) yang dicatumkan dalam *guide line* program kebijakan Edwards III dalam *standar operating prosedur* (SOP) merupakan sebuah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya menurut Agustino (2014:153) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan *Administrator Boirokrat*), untuk bisa melaksanakan nemtuk kegiatan-kegiatan pada setiap hari sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan masyarakat).

Fragmentasi merupakan bagian tanggung jawab ssuatu kebijakan kepada bebebrapa badan yang berbeda sehingga bisa memerlukan koordinasi umumnya semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan

semakinberkurang kemungkinan dalam keberhasilan program atau kebijakan menurut Agustino (2014:154) fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas masyarakat diantara beberapa unit kerja. Penilaian terhadap indikator struktur birokrasi dilakukan dengan cara menghitung rata-rata skor yang disajikan pada tabel 4.29

Tabel 4.29
Perolehan Nilai Skor Indikator Struktur Birokrasi

NO	Uraian Tugas	Jumlah Skor	Predikat
1.	Dilaksanakan kebijakan keterbukaan informasi sesuai dengan standar operasional	129	Baik
2.	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sudah menetapkan prosedur operasional penyebar luasana informasi publik	129	Baik
3.	Adanya pembagian tugas yang jelas dalam menyebarluaskan pekerjaan	132	Baik
Jumlah		390	
Rata-rata		130	Baik

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.29 terlihat bahwa dilaksanakan kebijakan keterbukaan informasi sesuai dengan standar operasional memperoleh skor 129 yang termasuk dalam predikat baik, perihal yang berkaitan dengan pejabat pengelola informasi dan

dokumentasi sudah menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik memperoleh skor 129 yang termasuk dalam predikat baik, perihal yang berkaitan adanya pembagian tugas yang jelas dalam menyebarluaskan pekerjaan memperoleh skor 132 yang termasuk dalam predikat baik. perolehan rata-rata skor untuk indikator struktur birokrasi adalah 130 yang termasuk predikat baik.

5. Rekapitulasi Rata-Rata Skor Tentang Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Jayawijaya

Berdasarkan perolehan skor dari setiap indikator maka untuk mengetahui seberapa baik Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayawijaya, diperlukan Rekapitulasi perolehan skor dari masing-masing indikator tersebut yang disajikan pada tabel 4.30

Tabel 4.30
Rekapitulasi Perolehan Skor Rata-Rata Tentang Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Jayawijaya

NO	Indikator	Skor	Predikat
1.	Komunikasi	128,75	Baik
2.	Sumber daya	122	Baik
3.	Disposisi atau sikap	124	Baik
4.	Struktur birokrasi	130	Baik
Jumlah		504,75	
Rata-rata		126,19	Baik

Sumber Data : Data Primer Tahun 2023

Pada tabel 4.30 terlihat bahwa indikator komunikasi perolehan skor 128,75 dengan predikat baik, indikator sumber daya perolehan skor 122 dengan predikat baik, indikator disposisi atau sikap perolehan 124 dengan predikat

baik, indikator struktur birokrasi perolehan 130 dengan predikat baik artinya bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Jayawijaya selama ini baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat masih sangat kurang karena pegawai bidang informasi dan komunikasi publik tidak mensosialisasikan tentang keterbukaan informasi publik enam bulan sekali dan masyarakat dapat mengakses keterbukaan informasi publik melalui website Kabupaten yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Sumber daya manusia dibidang teknologi dan informatika kurang mencukupi karena banyak pegawai dan keahliannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di Dinas Komunikasi dan Informatika, sumber daya peralatan masih kurang untuk menunjang penyebaran informasi publik.

Hasil dari penelitian indikator disposisi atau sikap pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika sangat baik, ramah, sopan, kepada masyarakat atau tamu yang ada keperluan dikantor kominfo.

Aspek struktur birokrasi tentang standar operasional prosedur sudah berjalan dengan baik dengan memakai peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa indikator komunikasi dengan perolehan nilai skor sebesar 128,75 dikategori baik, indikator sumber daya dengan perolehan nilai skor sebesar 122 kategori baik, indikator disposisi atau sikap dengan perolehan nilai skor sebesar 124 kategori baik, indikator struktur birokrasi dengan perolehan nilai skor sebesar 130 kategori baik, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Jayawijaya dengan rata-rata perolehan nilai skor untuk ke empat indikator adalah 126,19 yang termasuk pada predikat baik artinya bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Jayawijaya kategori baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian penulis menyarankan :

1. Komunikasi perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik.
2. Sumber daya manusia terutama di keterbukaan informasi publik perlu ditambahkan lagi karena mereka susah untuk menghendel semua pekerjaan mereka dan sarana prasarana perlu ditambahkan lagi karena masih kekurangan perangkat untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
3. Disposisi atau sikap perlu ditingkatkan lagi karena pegawainya tidak konsisten dalam waktu, tidak konsisten dalam mengerjakan pekerjaannya.

4. Struktur birokrasi pegawai komunikasi dan informasi sudah menggunakan standar operasional prosedur (SOP) sudah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Agus Setiawan, Dadang Sugiana, Jimi Narotama M. *Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, departemen ilmunajemen komunikasi, fakultas ilmu komunikasi, universitas padjajaran*, Email:agussetiawan@yahoo.co.id.1(2), 196-205.

Arikunto. 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Browne dan Wildavsky.2004 (dalam Nurdin dan Usman, 2004 : 7)

Cutlip, Scott M.Allen H. Center dan Glen M. Broom. 2009. *Effective publik relations (edisi Sembilan)*. Jakarta : Kencana.

Darmawan, Deni., & Kunkun Nur Fauzi. (2013). *Sistem informasi manajemen*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran, E. R. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1).

Kencana Syafiie, Inu. 2007. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.

Koswara, E. 1998. *Dinamika Informasi dalam Era Globalisasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Masmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and public policy*, New York : HarperCollins.

Sastro, Dhoho A, et. Al. (2010). *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum*.

Siyasah, A. (2020). *Manajemen Layanan Inormasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan Risa Dwi Ayuni FISIP- Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari* Email : rda.academic@gmail.com. 5(2), 80–87.

Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta Bandung.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung :cv alfabeta

Suharno, Djazuli, H.M.Tri.2006. keterbukaan dan Keadilan. Indonesia: PT Ghalia.

Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Effektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama: Jakarta.

Surahman, M. Akmal, M. Nazaruddin *Implementasi Good Governance di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 pada Pelayanan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah, Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Email: akmal@unimal.ac.id. 1(1), 20-28.*

Syaukani dkk. 2004 : 295. Artikel *Definisi tentang Implementasi menurut ahli*.

Zulaikha, Z. & Paribrata, A.I.(2017) “*implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur pada tahun 2016*” *jurnal studi komunikasi (Indonesian journal of communications studies)*, 1(2), 131-162.

b. Dokumen-Dokumen

Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. (n.d.).

KUISIONER PENELITIAN

A. IDENTITAS RESPONDEN :

Nomor Responden :

Jenis Kelamin :

Agama :.....

Umur :(tahun)

Jabatan :

Masa Kerja :

Pangkat :.....

Golongan :.....

Pendidikan Terakhir :.....

B. PETUNJUK PENGISISAN

Mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dengan cara member tanda check list/ centang (√) dari salah satu alternative jawaban yang tersedia, sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik diKabupaten Jayawijaya

C. Keterangan Alternatif Jawaban :

SB : Sangat Baik

B : Baik

TB : Tidak Baik

KB : Kurang Baik

STB : Sangat Tidak Baik

**Daftar Pertanyaan Implementasi Kebijakan
Keterbukaan Informasi Publik
(Studi Dinas Komunikasi Informasi dan Komunikasi)**

No.	Pernyataan	5	4	3	2	1
		SB	B	KB	TB	STB
Komunikasi						
1.	Penyampaian informasi publik secara cepat					
2.	Kebijakan keterbukaan informasi sudah disosialisasikan kepada masyarakat.					
3.	Pegawai memahami tentang kebijakan keterbukaan informasi publik.					
4.	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) telah melakukan koordinasi secara rutin					
Sumber Daya						
1.	Tersedia sarana dalam mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik					
2.	Tersedia sumber daya manusia dalam mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik					
3.	Pegawai memiliki keahlian dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan Informasi publik					

4.	Tersedia dana dalam menyampaikan kebijakan keterbukaan informasi publik					
5.	Tersedia sumber informasi dari dinas-dinas terkait kebijakan keterbukaan informasi publik					
Disposisi atau sikap						
1.	Pegawai bertanggungjawab dalam mengerjakan pekerjaannya					
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi sangat adil dalam memberikan tugas kepada pegawainya.					
3.	Pegawai sangat disiplin dalam waktu.					
4.	Pegawai konsisten dalam melaksanakan tugas					
5.	Pegawai menjalankan tugasnya dengan maksimal/baik					
Struktur Birokrasi						
1.	Dilaksanakan kebijakan keterbukaan informasi sesuai dengan standar operasional					
2.	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sudah menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik					
3.	Adanya pembagian tugas yang jelas dalam menyebarluaskan pekerjaan					

Lampiran 1 : Identitas Responden

No Responden	Jenis kelamin	Agama	Umur	Jabatan	Masa Kerja	Pangkat	Golongan	Pendidikan terakhir
1.	L	Kristen	50 Thn	Kepala dinas	15 Thn	Pembina TK.I	IV/b	S2
2.	P	Islam	58 Thn	Sekretaris	25 Thn	Pembina TK.I	IV/b	S2
3.	P	Islam	39 Thn	Kasubag pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi	13 Thn	Penata TK I	III/ d	S1
4.	P	Islam	40 Thn	Staf	10 Thn	Penata muda	III/ d	S1
5.	P	Kristen	32 Thn	Kasubag umum dan kepegawaian	12 Thn	Penata	III/c	S1
6.	P	Kristen	30 Thn	Kasie pemerintahan, politik, hukum dan HAM	10 Thn	Penata	III/c	S1
7.	p	katolik	25 Thn	Tenaga Kontrak	4 Thn	-	-	S1
8.	p	Kristen	28 Thn	Tenaga kontrak	5 Thn	-	-	S1
9.	L	Kristen	30 Thn	Kasie dokumentasi dan publikasi	12 Thn	Pengatur	II/c	SMA
10.	L	Kristen	38 Thn	Staf	10 Thn	Penata muda	III/a	S1
11.	P	Kristen	28 Thn	Staf	5 Thn	Pengatur TK.I	II/d	SMA
12.	L	Kristen	29 Thn	Tenaga kontrak	2 Thn	-	-	S1

13.	L	Kato lik	28 Th n	Tenaga kontrak	2 Thn	-	-	S1
14.	P	Krist en	25 Th n	Tenaga kontrak	3 Thn	-	-	S1
15.	L	Krist en	27 Th n	Tenaga kontrak	3 Thn	-	-	S1
16.	L	Isla m	45	Kepala seksi	20 Thn 9 Bln	pengat ur	II/c	SMA
17.	P	Kato lik	30 Th n	Staf	3 Thn	Penata muda	III/a	S1 Ekono mi
18.	L	Krist en	50 Th n	Kasie tata kelola persandian	25 Thn	Penata muda TTK.I	III/b	S1
19.	P	Isla m	31 Th n	Tenaga kontrak	2 Thn	-	-	S1 Teknik arsitekt ur
20.	L	Krist en	49 Th n	Staf	5 Thn	Penata muda	III/b	S1
21.	P	Krist en	32 Th n	Staf	2 Thn	Penata muda	III/a	S1
22.	L	Isla m	34 Th n	Staf	6 Thn 8 bln	Penata muda	III/a	S1 Kompu ter
23.	P	Krist en	38 Th n	Kasie. Pengawasan dan evaluasi persandian	11 Thn 1 bln	Penata muda TK.1	III/b	D3 Komun ikasi
24.	L	Krist en	40 Th n	Staf	15 Thn	Pengat ur muda TK.I	II/b	SMA
25.	P	Krist en	38 Th n	Staf	11 Thn	pengat ur	II/c	S1
26.	L	Krist en	32 Th n	Staf	7 Thn	Pengat ur muda	II/a	S1
27.	P	Kato lik	30 Th n	Staf	5 Thn	Pengat ur Tk.I	II/d	SMA

28.	P	Kristen	34 Thn	Staf	12 Thn	Pengatur muda	II/a	SMA
29.	P	Kristen	30 Thn	Staf	8 Thn	Pengatur muda TK.I	II/b	S1
30.	P	Kristen	32 Thn	Kabid persandian	9 Thn	pembina	IV/a	S1
31.	L	Kristen	40 Thn	Staf	10 Thn	Pengatur muda TK.I	II/b	SMA
32.	P	Kristen	26 Thn	Tenaga kontrak	3 Thn	-	-	S1
33.	P	Kristen	35 Thn	Kepala seksi infrastruktur dan jaringan	10 Thn	penata	III/c	S2 manajemen Adm.Publik

25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				

No res pon den	Indikator Sumber Daya																									
	1					2					3					4					5					
	S B	B	K B	T B	S T B	S B	B	K B	T B	S T B	S B	B	K B	T B	S T B	S B	B	K B	T B	S T B	S B	B	K B	T B	S T B	
1.			√					√				√						√					√			
2.		√					√					√					√						√			
3.			√				√						√					√						√		
4.		√					√					√					√						√			
5.			√				√					√					√						√			
6.		√						√					√					√						√		
7.		√					√						√				√							√		
8.		√					√					√					√						√			
9.			√					√				√					√						√			
10.			√					√					√				√							√		
11.			√				√					√					√						√			
12.			√					√				√					√						√			
13.			√					√				√					√						√			
14.			√					√				√					√						√			
15.			√					√				√					√						√			
16.	√					√					√					√						√				
17.		√					√					√					√						√			
18.			√				√					√					√							√		
19.		√					√					√					√						√			

20			√				√				√					√				√		
21		√						√				√					√					√
22		√				√				√				√					√			
23		√					√				√								√			
24		√					√					√							√			
25		√					√						√						√			
26		√					√						√						√			
27		√					√						√						√			
28		√						√					√						√			
29			√				√						√						√			
30			√					√				√							√			
31		√					√					√						√				
32			√					√					√						√			
33		√					√					√						√				
Jumlah	1	1	1			2	1	1		2	2	7		4	1	1		3	1	1	1	

No res pon den	Indikator Struktur Birokrasi														
	1					2					3				
	S B	B	K B	T B	S T B	S B	B	K B	T B	S T B	S B	B	K B	T B	S T B
1.		√					√					√			
2.	√					√					√				
3.		√					√					√			
4.			√					√				√			
5.		√					√					√			
6.		√					√					√			
7.		√					√					√			
8.		√					√					√			
9.		√					√						√		
10		√						√				√			
11			√				√						√		
12			√				√						√		
13			√					√					√		
14		√					√					√			
15		√					√					√			
16	√						√				√				
17		√					√					√			
18		√					√				√				
19		√					√					√			
20		√					√				√				
21		√					√					√			
22	√					√					√				
23		√					√					√			
24		√					√					√			
25		√					√					√			
26		√					√					√			
27		√					√					√			
28		√					√					√			
29			√					√				√			
30			√					√					√		
31		√					√					√			
32		√					√					√			
33		√					√					√			
Jum lah	3	2 4	6			2	2 6	5			5	2 3	5		

Lampiran 3 :

Jumlah ASN dan Tenaga kontrak pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Golongan Ruang dan jenis kelamin :

No	Uraian	Golongan / PNS								Jumlah		Total	
		I		II		III		IV		L	P		
		L	P	L	P	L	P	L	P				
1	Kepala Dinas							1		1		1	
2	Sekretaris								1		1	1	
3	Bidang Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik												
4	Bidang Penyelenggaraan e-Government				1					1		1	
5	Bidang Statistik Sektoral												
6	Bidang Keamanan informasi dan Persandian								1		1	1	
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					1					1	1	
8	Kepala Sub Bagian Keuangan			1							1	1	
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi					1					1	1	
10	Seksi Pengelolaan Informasi Publik												
11	Seksi Komunikasi Publik												
12	Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media												
13	Seksi Infrastruktur dan Teknologi					1					1	1	
14	Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi					1					1	1	
15	Seksi Layanan e-Government												
16	Seksi Pengumpulan Data Statistik					1					1	1	
17	Seksi Pengolahan dan Analisa Data Statistik												
18	Seksi Penyajian, Evaluasi dan Pelaporan Data Statistik			1							1	1	
19	Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian					1					1	1	
20	Seksi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian					1					1	1	
21	Seksi Pengawasan, Evaluasi dan penyelenggaraan Kesmanan Informasi dan Persandian												
22	Kelompok Jabatan Fungsional												
23	UPTD												
24	Staf PNS			3	2	4	3				7	5	12
25	Staf Tenaga Kontrak										1	6	7
26	Staf Tenaga IT										1		1
Jumlah Keseluruhan				7	14	3	3			33	33	33	

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Jayawijaya (November 2022)

Lampiran 4



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNA'IM)
YAPIS WAMENA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jalan Hom-Hom Wamena Kode Pos 99511 Kotak Pos 148
E-mail: lppmunaim@gmail.com Website : www.lppm.unaimwamena.ac.id

Nomor : 4.29/061/141011/2023
Lampiran : 1 (satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Pengantar Pelaksanaan Penelitian**

Kepada Yth
**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jayawijaya**
di-
Tempat

Dengan Hormat,

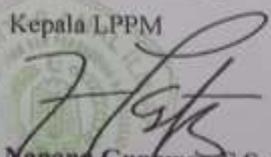
Sehubungan dengan rencana dan pengambilan data untuk Skripsi Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena atas nama:

Nama Lengkap : Syairah Marses
NIM : 2019 11 063
Semester : VIII (Delapan)
Bidang Kajian : Administrasi Publik
Prog.Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Jayawijaya (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika)
Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Untuk keperluan tersebut di atas, maka mohon kiranya dapat diberi ijin untuk memperoleh data yang berhubungan dengan judul Skripsi dimaksud di atas. Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wamena, 3 Juli 2023

Kepala LPPM


Nanang Gunawan, S.Sos., M.AB
NIDN. 1429088901

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Publik, di Wamena;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



Lampiran 6

foto bersama ibu Haspida Pawakkangi,S.H,M.Si Sekertaris Dinas Komunikasi dan Informatika



Foto bersama Ibu Sukma Wijayanti Pegawai Staf Dinas Komunikasi dan Informatika



Foto bersama Ibu Vonny Warikar, S.Sos bagian Kassubag umum dan kepegawaian
Dinas komunikasi dan informatika



Foto bersama Bapak Oktoberlin Banjarnahor, S.Kom Staf Dinas Komunikasi dan
Informatika



Foto bersama Bapak Imanuel G. M. Sawaki, S.Kom bidang penyelenggaraan komunikasi dan informasi publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika



Foto bersama Ibu Liesanni Fransina Rummy, A. Md. Kasie pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian Dinas Komunikasi dan Informatika



Foto bersama Bapak Angga Ramadan Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika



Foto bersama Bapak Anthon Thomas Erari Staf Dinas Komunikasi dan Informatika

BIODATA PENULIS



Nama Syairah Marses , Nomor Induk Mahasiswa (201911063) Lahir pada tanggal 14 Maret 2002 di To'lisa, Orang Tua Ayah (Alm) Marses dan Ibu Masriani. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri 102 Tondok Tua lulus pada tahun 2013, melanjutkan di SMP Negeri 1 Asologaima lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Asologaima . Akhirnya dapat melanjutkan kuliah pada tahun 2019 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIM Yapis Wamena mengambil program studi Administrasi Publik (S1).